

GURU TIGA ZAMAN

Pendahuluan

Dalam kebudayaan Indonesia, profesi guru mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Masyarakat Jawa mengenal ungkapan “guru, ratu, wong tuo karo” artinya taatilah pertama-tama gurumu, lalu rajamu, baru kemudian kedua orang tuamu. Penghargaan demikian terjadi juga pada masa kolonial status dimana profesi guru tetap mempunyai kedudukan yang terhormat karena itu guru dihargai masyarakat.¹ Mereka dianggap panutan masyarakat, pemimpin masyarakat, dipanggil *ndoro guru* dengan status ekonomi yang cukup tinggi. Pada masa kolonial, memang status profesi guru relatif tinggi dengan gaji sebesar 40 Gulden. Jumlah tersebut sangat luar biasa mengingat ungkapan pada masa kolonial yang mengatakan bahwa seorang *inlander* cukup hidup dengan segobang (2,5 sen) sehari.²

Pada masa pendudukan militerisme Jepang, sang guru mendapat kehormatan dengan julukan “Sensei” yang sesuai dengan kebudayaan Jepang dimana guru mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan sekitar tahun 1950-an, profesi guru pernah menjadi dambaan orang. Dalam berbagai daerah, ambil

¹ Gaji guru pada akhir abad ke-19 tidak kurang dari gaji Wedana, sehingga Wedana pun ingin menjadi guru. *Retnodhoemilah*, 1901, Th. 7 No. 31 sebagaimana dikutip dalam Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Terj. KITLV. Jakarta: Grafiti, 1989, hal. 32

² H.A.R. Tilaar. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta:Grasindo, 1995, hal. 317

contoh di kawasan Indonesia Timur, profesi yang dicari adalah pegawai negeri atau guru.³

Dalam perkembangan masyarakat berikutnya terjadi pergeseran deprofesionalisasi jabatan guru, berkaitan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Profesi guru bukan merupakan pilihan utama dan bergengsi, bahkan status profesinya lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain seperti dokter, hakim, teknisi, dan bahkan buruh sekalipun.⁴ Profesi guru semakin terpuruk, khususnya guru Sekolah Dasar (SD) yang terkesan “terbelakang” kesejahteraannya. Padahal keprofesian guru menuntut kecakapan dan usaha intelektual yang tinggi, serta pendidikan formal yang cukup tinggi.

A. Guru Bumiputera Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Guru dalam artian formal pada masa Pemerintah Hindia Belanda dihasilkan dari sekolah yang bernama *Kweekschool* (Pendidikan Keguruan)⁵. Pendidikan Keguruan ini mulai diatur

³ *Kompas*, 8 Oktober 1994

⁴ Sangat berbeda dengan rekan-rekannya yang berprofesi pekerja swasta, buruh misalnya, gaji guru berpangkat rendah Golongan II-A, misalnya tidak jauh berbeda dengan gaji seorang buruh pabrik yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Demikian pula dengan gaji guru baru Golongan III-A yang masih berada di bawah upah minimum regional (UMR). Untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota UMR pada saat itu adalah Rp. 198.500, - sementara gaji guru Gol. III-A dengan masa kerja dua tahun hanya menerima Rp. 160.000,-. Mengenai hal ini lihat, <http://www.tempointeraktif.com>.

⁵ *Kweekschool* pertama yang didirikan di Hindia Belanda adalah yang diselenggarakan oleh Zending di Ambon pada tahun 1834. Sekolah tersebut berlangsung sampai 30 tahun (1866) dan dapat memenuhi kebutuhan guru bumiputera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Selanjutnya sekolah tersebut didirikan di Surakarta (1852), Bukittinggi (Fort de Kock) (1858), Tapanuli (1864), dan Bandung (1866). Mengenai perkembangan *Kweekschool* lihat, I.Djumbuhur dan H. Danasuparta. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu, 1976, hal. 131;

pada tahun 1871 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah yang menyatakan, bahwa pengadaan sekolah dasar bumiputera harus didahului oleh pengadaaan tenaga gurunya. Atas dasar peraturan itulah *Kweekschool* diperbanyak.⁶ Jenis sekolah itu mengalami pasang-surut. Karena adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka beberapa sekolah guru ditutup dengan alasan penghematan keuangan negara. *Kweekschool* yang ditutup yaitu yang di Tapanuli pada tahun 1874, Magelang dan Tondano pada tahun 1885, Padang Sidenpuan (1891), Banjarmasin (1893), dan Makassar (1895).⁷

Hadirnya *Kweekschool* ternyata kurang diminati oleh golongan bangsawan, sehingga murid-murid *Kweekschool* kebanyakan dari keluarga priyayi rendah, pegawai rendah, para pedagang, keluarga mantri atau dari keluarga guru sendiri. Untuk itu dalam rangka memenuhi keinginan kaum bangsawan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari *Kweekschool*, maka pada tahun 1878 pemerintah mendirikan *Hoofdenschool*⁸ yang bertujuan mendidik calon-calon pegawai pemerintah.⁹

Sumarsono Mestoko. *Pendidikan di Indonesia, Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta:Depdikbud, 1979, hal. 53

⁶ Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah pada tahun 1871, beberapa *Kweekschool* didirikan di Tondano pada tahun 1873, Ambon (1874), Magelang, Probolinggo, dan Banjarmasin (1875), Makassar (1876), dan Padang Sidempuan (1879). I.J. Brugmans. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands-Indie*. Groningen: J.B. Wolters. 1938, hal. 142; lihat juga Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hal. 54

⁷ Penutupan itu disebabkan juga oleh keinginan pemerintah dalam menghemat biaya. *Ibid.*, hal. 54

⁸ Sekolah ini menurut bahasa sehari-hari disebut “sekolah raja atau sekolah menak”. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu dan Belanda. Setelah mengalami percobaan dan perubahan pada tahun 1900, sekolah ini diberi nama OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* = Sekolah untuk Pendidikan

Kweekschool ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru bumiputera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu.¹⁰ Lulusan *Kweekschool* diberi gaji yang disamakan dengan gaji seorang asisten wedana sebesar f. 50,- hingga f. 150,- per bulan.¹¹ Lulusan *Kweekschool* mendapat gelar resmi “manteri guru” yang memberikan mereka kedudukan yang nyata di kalangan pegawai pemerintah lainnya. Mereka berhak untuk menggunakan payung, tombak, tikar, dan kotak sirih menurut ketentuan pemerintah. Mereka juga mendapat biaya menggaji empat pembantu untuk membawa keempat lambang kehormatan itu. Tanda-tanda kehormatan itu membangkitkan rasa hormat, termasuk murid-muridnya sendiri, khususnya anak-anak kaum ningrat.¹²

Adanya rangsangan gaji sebesar itu dan tanda-tanda kehormatan, tetap saja jabatan guru pada perkembangan

Pegawai Bumiputera) yang mengkhususkan pada pendidikan Pangreh Praja dan Jaksa. Lama pendidikannya lima tahun. Pada tahun 1927 OSVIA direorganisir menjadi MOSVIA (*Middelbaar Opleidingschool voor Indische Ambtenaren*) dengan lama pendidikannya tiga tahun. I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op.cit.*, hal. 133-34, Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hal 52, 73. Lihat juga Soegarda Poerbakawatja. *Pendidikan Dalam Alam Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta:Gunung Agung, 1970, hal. 24

⁹ Lihat I.J. Brugman, *op.cit.*, hal. 175

¹⁰ Lulusan sekolah ini biasanya ditempatkan sebagai Kepala Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu atau guru sekolah kelas satu dan bagi lulusan ini terbuka kesempatan untuk meraih akta tingkat menengah, yakni suatu kualifikasi untuk memberikan pengajaran di sekolah tingkat menengah bumiputera. P.J. Gerke, “Pengadaan Personil”, dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terj. Amir Sutaarga. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal. 199

¹¹ Savitri Prastiti Scherer. *Keselarasan dan Kejanggalan*. Jakarta:Sinar Harapan, 1985, hal. 48

¹² S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars, 1987, hal. 40

berikutnya kurang diminati, khususnya oleh para bangsawan.¹³ Menurut Akira Nagazumi, ketika kecenderungan pribadi terhadap pekerjaan di kalangan pemerintahan pribumi sangat berbeda dan banyak mengalami perubahan, sementara kedudukan priyayi secara menyeluruh kadang-kadang tidak menentu, maka kedudukan sosial guru pribumi mengalami perubahan yang luar biasa.¹⁴ Waktu gaji guru tidak kurang dari gaji wedana — pada akhir abad ke-19— ternyata wedana pun ingin menjadi guru. Tetapi kemudian daya tarik jabatan guru mengalami penurunan luar biasa, dibandingkan dengan jabatan-jabatan pemerintahan lainnya, karena itulah di antara semua priyayi dari lingkungan pemerintahan, (gaji) guru berada ditingkat paling rendah.¹⁵

Jabatan guru yang kurang diminati sebenarnya dapat dilihat dari kedudukan atau status sosial guru-guru bumiputera pada awal abad ke-20. Waktu itu struktur sosial kolonial didasarkan pada perbedaan ras. Masyarakat Eropa (Belanda) menempati urutan paling atas, sementara pribumi menempati urutan yang paling bawah. Dalam masyarakat pribumi yang sudah menempati urutan paling bawah, ternyata kedudukan seseorang masih juga dibedakan. Menurut Sartono Kartodirdjo, kedudukan seseorang pada awal abad ke-20 dapat dilihat dari

¹³ Darsiti Soeratman. "Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat Djawa Pada Akhir Abad 19," makalah disampaikan pada *Seminar Sejarah Nasional II*. Yogyakarta, 1970.

¹⁴ Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. (terjemahan KITLV). Jakarta:Grafiti, 1989, hal. 32

¹⁵ Retnodhoemilah (Jogyakarta) 1901 Thn. 7 No. 31 sebagaimana dikutip dalam Akira Nagazumi., *op.cit.*, hal. 32

aspek keturunan, pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan.¹⁶ Dihubungkan dengan guru, maka aspek-aspek itu dapat dipakai untuk menentukan kedudukan sosialnya. Misalnya dari aspek keturunan, mayoritas guru-guru bumiputera berasal dari keluarga biasa, seperti petani, pedagang, mantri, pegawai rendah, dan dari keluarga guru sendiri. Kalaupun ada dari keluarga priyayi, hanyalah priyayi rendahan.¹⁷

Dari segi penghasilan (gaji), *Departement van Onderwijs en Eredienst* (Departemen Pendidikan dan Agama) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani gaji guru-guru bumiputera, membuat ketentuan bahwa penghasilan guru-guru berdasarkan atas ijazahnya. Adapun sekolah-sekolah guru yang ada pada awal abad ke-20 adalah *Normaalschool*, yaitu sekolah guru dengan lama pendidikan 4 tahun dan menerima lulusan dari sekolah *Vervolg* atau Sekolah Kelas II, *Hogere Kweekschool* (HKS) yaitu sekolah guru dengan lama belajar 3 tahun, *Hollands Inlandsche Kweekschool* (HIK) untuk menggantikan HKS dengan lama pendidikan 6 tahun, *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK) yaitu sekolah guru Cina yang sederajat dengan HIK, dan Kursus *Hoofdacte*.¹⁸

¹⁶ Sartono Kartodirdjo. "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", *Lembaran Sejarah*, Universitas Gadjah Mada, 1969, hal. 41-43

¹⁷ Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hal. 8

¹⁸ Yang dapat mengikuti kursus *Hoofdacte* adalah tamatan HKS atau HIK dengan lama belajar 2 tahun. Pemilik ijazah *Hoofdacte* adalah calon kepala (*Hogere Inlandsche School* (HIS). *Hoofdacte* ini ada dua macam, yaitu *Europese Hoofdacte* (Eur.HA) dan *Indische Hoofdacte* (Ind. HA) yang perbedaannya terletak pada bahasa Belanda dan ilmu mendidik. I. Djumhur dan Danasaputra, *op.cit.*, hal. 140-141. Lihat Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hal. 72

Untuk lulusan Guru Sekolah Desa, gaji permulaan sebesar f. 7,50 per bulan. Pemerintah Hindia Belanda sendiri menetapkan penghasilan mereka minimal f. 15,- maksimal f. 20-25,- per bulan, hal itu disebabkan mereka bukanlah pegawai pemerintah. Untuk menutupi kekurangan gaji tersebut dapat diambil dari kas desa, tetapi jika kas tidak mampu membayar dengan uang, dapat diganti dengan tanah bengkok guru desa, yaitu berupa tanah sawah atau tanah garapan dengan luas tertentu.¹⁹

Bagi guru-guru bantu Sekolah Kelas Dua yang merupakan lulusan Kursus Guru Bantu selama dua tahun, mendapat gaji sekitar f. 20,- sampai f.30,- per bulan. *Normaalschool* yang melahirkan guru sekolah kelas dua mendapat gaji sekitar f. 30,- sampai f. 45,- per bulan.²⁰ Sementara itu guru-guru lulusan *Kweekschool* yang biasanya ditempatkan sebagai Kepala Sekolah Kelas Dua, Sekolah Kelas Satu atau guru Sekolah Kelas Satu, menerima gaji sekitar f. 75,- sampai f. 150,- per bulan. Dibandingkan dengan guru-guru Sekolah Desa, Guru Bantu Kelas Dua dan *Normaalschool*, lulusan *Kweekschool* lebih dihargai oleh pemerintah. Hal itu wajar karena kecakapan dan pendidikannya lebih tinggi ditambah dengan kemampuan dalam bahasa Belanda.

¹⁹ Depdikbud. *Pendidikan di Indonesia 1900-1942*. (Disadur dari S.L. van der wal. *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie 1900-1942*). Jakarta, hal 72, 105

²⁰ Mengenai gaji ini dapat dilihat dari *Dwijdja Oetomo* (Surat Kabar Yogyakarta). "Keloeh Kesah Bangsa Goeroe-goeroe", 25 April 1914. Dan sebagai bahan bandingan lihat PB. PGRI, *PGRI Dari Masa ke Masa*. Jakarta:YPLP-PGRI Pusat, 1984, hal. 14 mencatat gaji lulusan *Normaalschool* sebesar f. 22,50,- per bulan

Pendapatan gaji untuk jenis guru lainnya, seperti tamatan *Hogere Kweekschool* (HKS) atau *Hollands Inlands Kweekschool* (HIK) adalah sebesar f. 70,- sampai f. 250,- per bulan, *Europese Kweekschool* f. 125,- per bulan, dan tamatan *Hoofdacte* sebesar f. 130,- per bulan.²¹

Berdasarkan pendapatan atau gaji yang diterima oleh guru-guru bumiputera dan guru-guru yang berkebangsaan Eropa, terlihat gaji guru-guru bumiputera jauh di bawah gaji guru-guru Eropa. Seorang guru kebangsaan Eropa dapat menerima gaji di atas f. 100,- per bulan, sementara gaji yang diterima seorang guru bumiputera lulusan *Kweekschool* adalah f. 75,- per bulan.²²

Perbedaan gaji tidak hanya antara guru-guru bumiputera dan guru-guru berkebangsaan Eropa, tetapi juga di antara guru-guru bumiputera terdapat perbedaan. Sejak tahun 1878, lulusan *Kweekschool* menerima gaji di atas f. 75,- sampai 150,- per bulan. Guru-guru bantu Sekolah Kelas Dua mendapat gaji sekitar f. 20,- sampai f. 30,- per bulan. Jika disesuaikan dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan hidup, gaji tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup.²³ Keadaan itu dijadikan dasar untuk menuntut kenaikan gaji. Pada tahun 1914 pemerintah menaikkan gaji guru-guru bantu dan gaji guru Sekolah Kelas Dua sebesar f. 5,-, tetapi kenaikan tersebut belum cukup memuaskan mereka.²⁴

²¹ PB. PGRI, *op.citi.*, hal 14-15

²² P.J. Gerke, *op.cit.*, hal. 210-213

²³ *Dwidja Oetomo*, 10 Desember 1914

²⁴ *Darmo Kondo*, 10 Oktober 1914

Adanya perbedaan gaji dari masing-masing lulusan sekolah yang ada pada waktu itu, membuat guru-guru bumiputera berusaha untuk memperjuangkan nasibnya. Dwidjosewojo²⁵ sebagai anggota Pengurus Besar Budi Utomo mulai memikirkan wadah perjuangan para guru dengan membentuk Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada akhir tahun 1911.²⁶ PGHB yang anggotanya terdiri dari Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Desember 1912.

Pada kongres pertamanya di kota Magelang tanggal 12 Pebruari 1912, terbentuklah kepengurusan besar PGHB.²⁷ Bersama dengan kongres tersebut dibentuklah perusahaan

²⁵ Dwidjosewojo adalah seorang guru lulusan Kweekschool Probolinggo tahun 1886. Karirnya dimulai pada tahun 1886 sebagai guru bantu Sekolah Dasar di kota Ngawi, Jawa Timur. Juni 1887 diangkat guru Sekolah Kelas Satu di kota Ponorogo kemudian Maret 1891 dimutasikan sebagai guru bantu di Sekolah Kelas Satu Sri Menganti, Yogyakarta. Pada tahun 1897 dipindahkan ke Purwokerto dan dipromosikan menjadi Kepala Sekolah Kelas Satu di kota yang sama. Dalam tahun 1909, ia ditugasi menjabat guru bahasa Jawa di Kweekschool Yogyakarta. Dan dari sekolah inilah ia mengembangkan dirinya menjadi salah satu tokoh terkemuka di Budi Utomo. Lihat, D. Sutanto, AAI-J. *Dwidjosewojo 1867-1943 Tokoh Pergerakan Nasional Penderita Bumiputera 1912*. Jakarta: Bumiputera, 1992, hal. 22

²⁶ *Ibid.*, hal. 22-23, sebagaimana mengutip pada Soebangsih. *Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908- 20 Mei 1918; Uitgave: Tijdschrift Nederland-Indie Oud en Nieuw*. Amsterdam 1918, hal. 23 antara lain menyebutkan “Hij had een groot aandeel in de tot stand koming van het neutraal onderwijs, in de vorming van de Perserikatan Guru Hindia Belanda, in de totstandkoming van studiefonds enz. Er is bijkans niets, waarin de heer Dwidjosewojo geen aandeel had” (Ia mempunyai peran yang besar dalam mendirikan sekolah-sekolah swasta, dalam pembentukan Perserikatan Guru Hindia Belanda, dalam mengadakan dana beasiswa, dll. Bahkan hampir tidak ada hal yang ia tidak berperan di dalamnya). Lihat juga Akira Nagazumi, *op.cit.*, hal 153-154

²⁷ Susunan Pengurus Besar PGHB hasil kongres di Magelang:

Ketua : Mas Karto Hadi Soebroto, Guru bahasa Melayu pada MOSVIA,
Magelang
Sekretaris : Mas Ngabehi Dwidjosewojo, Guru Kweekschool Yogyakarta
Bendahara : Mas Adiwidjojo, Guru Sekolah Kelas Satu Magelang

asuransi jiwa nasional yang pertama, *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij P.G.H.B.*, disingkat O.L. Mij. PGHB yang kemudian hari menjadi Asuransi Jiwa Bumipoetra (AJB Bumipoetra) 1912²⁸ sebagai usaha memperjuangkan nasib anggotanya yang terdiri dari berbagai pangkat dan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Gagasan Dwidjosewojo untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa telah membuktikan bahwa ia adalah tokoh yang cakap dan berwawasan jauh ke depan. Pada saat Budi Utomo masih bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan, Dwidjosewojo telah melompat ke depan untuk mencoba mengembangkan bidang usaha yang berwawasan sosial ekonomi, bahkan sebelum Sarekat Dagang Islam lahir.²⁹

Langkah-langkah yang ditempuh oleh PGHB membentuk O.L. Mij. PGHB itu lebih banyak didorong oleh cita-cita luhur demi kebaikan sesama kaum bumiputera, khususnya para guru yang tergabung dalam PGHB, dan tidak disadari bahwa mereka itu telah memiliki suatu bidang usaha yang kelak berkembang pesat.³⁰ Pemerintah Hindia Belanda sendiri memberikan subsidi

²⁸ Gagasan mendirikan perusahaan asuransi jiwa itu diperoleh dari NILLMIJ (*Nederlansch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij*), sebuah perusahaan asuransi jiwa Belanda yang didirikan di Indonesia pada tahun 1859. Mulai awal tahun 1910, Dwidjosewojo menerima kiriman laporan tahunan dari direksi NILLMIJ yang rupanya sangat menarik minat dan mempelajarinya lebih lanjut sehingga terwujudlah perusahaan asuransi jiwa untuk bumiputera. Lihat Risalah Rapat Umum Anggauta O.L. Mij Boemi Poetra, tanggal 12-13 Februari 1941, hal 3-4 sebagaimana dikutip oleh D. Sutanto. AAI-J, *op.cit.*, hal 62

²⁹ *Ibid.*, hal 67

³⁰ Setelah O.L. Mij. PGHB berubah menjadi O.L. Mij Boemi Poetera, dilaporkan bahwa pada tahun 1915 ada sebanyak 65 orang agen yang tersebar di seluruh Jawa yang sebagian besar dipegang oleh guru-guru atau jabatan yang berkaitan dengan pendidikan. *Ibid.*, hal 76

kepada PGHB untuk O.L. Mij. PGHB sebesar f. 300,- sebulan.³¹ Dengan diterimanya subsidi sebesar itu sebulan, keadaan O.L. Mij. PGHB menjadi lebih baik.

Perusahaan Asuransi Boemipoetra yang langsung di bawah pengurusan PGHB dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota pada akhirnya lepas dari PGHB. Mengenai hal ini penulis belum menemukan data apa yang menyebabkan perusahaan Asuransi Boemipoetra lepas dari organisasi guru (PGHB). Untuk itu tidak mudah bagi PGHB untuk memperjuangkan nasib anggotanya yang pada waktu itu memiliki latar belakang pendidikan, pangkat, dan status yang berbeda hanya dengan asuransi jiwa. Kondisi sosial dan politik pada waktu itu mempersulit juga terciptanya persatuan di antara guru. Tujuh tahun kemudian setelah pendiriannya (1919), PGHB pecah³² dengan bermunculan organisasi-organisasi guru berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat atau tingkat sekolah yang berbeda. Organisasi-organisasi guru yang lahir itu antara lain *Kweekschool Bond* (KSB), *Perserikatan Guru Desa* (PGD), *Perkumpulan Normaalschool* (PNS), *School Opziener's Bond* (SOB), *Vaak Onderwijzer's Bond* (VOB), *Perserikatan Guru Ambacht School* (PGAS), *Hogere Kweekschool Bond* (HKSB), *Nederlands Indische Onderwijzers Genootschap* (NIOG), *Christelijke Onderwijzer's Vereeniging* (COV), *Onderwijzer's Vak*

³¹ Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 8 tanggal 15 November 1913, Arsip Nasional

³² Menurut PB. PGRI, *op.cit.*, hal. 16, PGHB pecah dalam pengertian masing-masing anggota tetap berjuang sesuai dengan program kerjanya, terutama dalam memperjuangkan gaji guru.

*Organisatie (OVO), Katholieke Onderwijzer's Bond (KOB), dan Chineesche Onderwijzer's Bond (COB).*³³ Perpecahan ini sangat buruk akibatnya bagi guru, antara lain martabat guru menjadi turun dan mereka tidak kompak lagi dalam memperjuangkan statusnya.³⁴

Sebagai usaha untuk memperjuangkan nasib anggotanya, PGHB pada tahun 1930-an mencoba menggabungkan diri pada Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN). PVPN merupakan perpusatan serikat sekerja pegawai negeri yang sejak pendiriannya berada di luar pengaruh partai-partai politik dan PVPN sendiri tidak mempunyai tujuan politik.³⁵ Masuknya PGHB menjadi anggota PVPN diharapkan dapat memperjuangkan nasib guru. Beberapa usaha PVPN itu antara lain pada bulan Desember 1931 mengadakan rapat disertai oleh perkumpulan politik Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, dan Jong Celebes, untuk memprotes rancangan pemerintah yang hendak mengadakan penghematan besar-besaran di lapangan pengajaran, yang berakibat tidak saja guru-guru banyak kehilangan pekerjaan tetapi juga menghambat kemajuan rakyat.³⁶

³³ Hadi Supeno. *Potret Guru*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 64

³⁴ M. Rusli Yunus, *et.al.*, *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003*. Jakarta:PB. PGRI, 2003, hal. 4

³⁵ Tujuan PVPN adalah memperjuangkan perbaikan kedudukan para pegawai negeri sipil, menentang hal-hal yang merugikan, serta bertindak mengatur terhadap aksi anggotanya (organisasi) masing-masing. PVPN hanya berhadapan dengan satu majikan umum yaitu pemerintah yang tidak bermusuhan terhadap PVPN karena badan ini tidak "berpolitik", dalam arti tidak mengusik tentang peninjauan. A.K. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta:Dian Rakyat, 1984, hal. 157-158

³⁶ *Ibid*, hal 158

Perkembangan berikutnya PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933 sebagai akibat dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai serikat sekerja pegawai negeri.³⁷ Pada kongresnya ke-23 di Surabaya tanggal 2-6 Januari 1934, PGI yang telah mempunyai 20.000 anggota membicarakan kedudukan para guru berhubungan dengan krisis dan penghematan gaji pegawai negeri.

Perjuangan PGI itu tidak seluruhnya berjalan mulus, Persatuan Guru Bantu (PGB) pada bulan Juli 1934 mengundurkan diri dari PGI karena dianggap kurang tegas dalam mempertahankan kepentingan golongan Guru Bantu. PGB menyalahkan sikap PGI dengan diberlakukannya peraturan gaji baru oleh pemerintah yang sangat menjatuhkan kedudukan dan gajinya. Meskipun PGB mengundurkan diri, perkumpulan guru-guru lainnya tetap bersatu dalam PGI, antara lain PGAS, VOB, *Oud Kweekscholieren Bond* (OKSB), PNS dan HKSB.³⁸

Kongres PGI ke-25 tanggal 25-29 Nopember 1936 di Madiun, isinya menentang maksud pemerintah untuk memindahkan urusan pengajaran dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah, berhubung kurang perlengkapan

³⁷ Peraturan ini memuat bahwa pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota sesuatu serikat sekerja, jika di dalam pengurusnya tidak ada paling sedikit satu pegawai negeri. Dan anggota pengurus pegawai negeri ini sebelum menerima jabatannya sebagai pengurus serikat sekerja, harus menerangkan, bahwa ia juga sebagai anggota pengurus serikat sekerja itu akan selalu memperingati dan mempertahankan kepentingan pemerintahan jajahan dan ia akan menentang propaganda dan aksi yang dapat merugikan tata tertib dan suasana-baik di kalangan pegawai negeri (keterangan-setia pada pemerintah). *Ibid.*, hal. 159

³⁸ *Ibid.*, hal 160

dan terbatasnya keuangan pemerintah daerah, dan dikhawatirkan dapat berakibat pada kemuduran pengajaran.³⁹ Di dalam Kongres PGI ke-26 yang diadakan pada bulan Nopember 1937 di Bandung bertepatan dengan peringatan dua puluh lima tahun berdirinya PGI, dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Selanjutnya di dalam Kongres PGI tahun 1938 yang diselenggarakan di Malang, diputuskan antara lain perlunya perbaikan gaji para guru dan menuntut agar pendidikan dan pengajaran yang diserahkan ke daerah harus didahului dengan perbaikan keuangan daerah.⁴⁰

Demikianlah perkembangan organisasi guru pada zaman kolonial yang berhubungan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia. A.K. Pringgodigdo telah memasukan organisasi yang tergabung dalam PGHB dan PGI pada Pergerakan Serikat Sekerja sebagai bagian dari Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

B. Guru Bumiputera Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii) Angkatan Udara Jepang menyerang Pearl Harbour, pusat pertahanan Amerika Serikat di Pasifik, dan angkatan lautnya mulai beraksi di seluruh Pasifik. Sementara itu angkatan daratnya mendarat di Indochina, Malaya, dan Filipina. Pecahlah

³⁹ Masalah ini kita alami sampai dewasa ini dan tetap merupakan masalah yang rumit berkenaan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah ingin agar urusan pendidikan kepada daerah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951, namun demikian otonomi tersebut tidak disertai dengan dana yang dibutuhkan dan tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Lihat H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan*, Jakarta: Grasindo, 1995, hal 16

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 16. Lihat juga A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hal 160-161

perang Asia Timur Raya dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang. Pemerintah Hindia Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Sejak itu pula serangan diarahkan ke Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Hindia Belanda.⁴¹

Mulai tanggal 10 Januari 1942 penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai dengan dikuasainya Tarakan yang kemudian disusul Balikpapan, Menado, Pontianak, Ambon, Makasar, dan Palembang. Daerah-daerah tersebut diduduki armada Jepang selama bulan Januari-Februari 1942. Tanggal 28 Pebruari armada Jepang mulai bergerak di Laut Jawa dan esok harinya 1 Maret, Jepang mendarat di Banten, Eretan, dan Kranggan. Batavia jatuh 5 Maret disusul Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya. Akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Panglima Militer Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyerah di Kalijati, Subang kepada Letnan Jenderal Imamura Hitsoji.⁴² Sejak itu pula berakhir

⁴¹ Muhammad Dimiyati. *Sedjarah Perdjuaangan Indonesia*. Djakarta:Widjaya, 1951, hal. 43. Lihat juga M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. (Terj. Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1998, hal. 294

⁴² Penyerahan Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat ini membuktikan betapa lemahnya pasukan Belanda yang tidak lebih dari *beambtestaat* atau negara yang diatur oleh pegawai atau polisi-polisi yang hanya mampu mengamankan dari gangguan kerusuhan tetapi tidak mampu menandingi kekuatan militer Jepang. Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal. 118-19. Sementara itu Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta:Gramedia, 1987, hal. 220-80, menyatakan bahwa meskipun dalam kenyataannya keunggulan pasukan Jepang diakui pihak Sekutu tetapi setengahnya timbul protes dari beberapa pihak yang merasa tidak puas karena penyerahan yang begitu cepat tanpa diakhiri dengan pertempuran sengit. Dikatakannya bahwa Ter Poorten mengambil keputusan untuk penyerahan tanpa konsultasi lebih dulu dengan pihak lain seperti pasukan Sekutu, khususnya pasukan Australia dan pasukan *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL).

kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulailah pendudukan militer Jepang di Indonesia.

Sesudah tentara pendudukan militer Jepang mulai berkuasa, terdapat beberapa kebijakan yang diberlakukan terhadap bekas jajahan Hindia Belanda. Pertama, Jepang ingin menghapuskan semua pengaruh Barat di dalam masyarakat Indonesia⁴³, dan kedua, segala kekuatan dimobilisasi untuk mencapai kemenangan perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pendidikan pun diarahkan kepada tujuan yang dianggapnya suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya.⁴⁴ Oleh sebab itu segala kekuatan dan sumber-sumber yang ada diarahkan kepada peperangan dan tujuan perang Jepang, termasuk pendidikan seluruhnya dijadikan alat untuk kepentingan perang Jepang.

Dasar pendidikan di sekolah-sekolah adalah pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Apabila zaman kolonial Belanda isi pendidikan diarahkan kepada kebudayaan Barat, maka pada zaman Jepang diarahkan pada kebudayaan Jepang. Kita lihat misalnya apa yang terjadi di berbagai tingkatan pendidikan: setiap pagi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang "Kimigayo". Upacara pagi dengan

⁴³ Hal ini antara lain terlihat dalam kebijakan untuk menghapuskan bahasa Belanda, baik penggunaannya dalam pergaulan hidup sehari-hari, berbagai tulisan dalam bahasa Belanda, dan dalam perkumpulan semuanya harus diindonesiakan. H.A.R. Tilaar.*op.cit.*, hal. 43-44

⁴⁴ Kongkritnya landasan idiil pendidikan pada jaman pendudukan Jepang yang disebut "Hakko Ichiu" adalah mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai "Kemakmuran Bersama Asia Raya". Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hal. 88. Lihat juga Djohan Makmur, et.al., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman penjajahan*. Jakarta:Depdikbud, 1993, hal. 100-101

pengibaran bendera Hinomaru dan membungkukkan badan sembilan puluh derajat untuk menghormati Kaisar Tenno Heika. Seterusnya diadakan upacara sumpah setia dalam memelihara semangat untuk mencapai cita-cita perang suci demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk mendukung ke arah sana, setiap anak harus kuat jasmaninya sehingga diadakanlah senam setiap pagi (*taiso*) dan kerja bakti (*kinrohoshi*).⁴⁵ Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan suasana perang sehingga banyak nyanyian, semboyan, dan latihan-latihan yang dihubungkan dengan persiapan menghadapi perang.

Usaha penanaman ideologi Hakko Ichiu melalui sekolah-sekolah dan supaya terdapat keseragaman dalam maksud-maksud pemerintah pendudukan Jepang, maka diadakan latihan guru-guru di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten/daerah mengirimkan beberapa orang guru untuk dilatih selama 3 bulan. Setelah selesai mengikuti latihan tersebut, mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk kemudian melatih guru-guru lainnya mengenai hal-hal yang mereka peroleh dari Jakarta. Bahan-bahan pokok yang mereka dapatkan dari latihan itu adalah:

1. Indoktrinasi mental ideologi mengenai “Hakko Ichiu” dalam rangka kemakmuran bersama di “Asia Raya”.
2. Latihan kemiliteran dan semangat Jepang (*Nippon Seisyini*).
3. Bahasa dan Sejarah Jepang dengan adat-istiadatnya.
4. Ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitis

⁴⁵ Sumarsono Mestoko. *op.cit.*, hal 90. H.A.R. Tilaar. *op.cit.*, hal 46-47

5. Olahraga, lagu-lagu, dan nyanyian-nyanyian Jepang.⁴⁶

Diluar dugaan, seakan-akan pada masa tersebut pendidikan formal berkembang dengan pesat sehubungan dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Kebijakan di bidang pendidikan itu antara lain: pendidikan untuk kebutuhan perang Asia Timur Raya, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, perubahan sistem pendidikan yang lebih merakyat, dan perubahan-perubahan di dalam kurikulum. Kebijakan itu sebenarnya berbeda dengan kenyataan, karena pada zaman Jepang terjadi penurunan jumlah Sekolah Dasar, murid, dan gurunya dibandingkan dengan keadaan pada akhir masa penjajahan Belanda.⁴⁷

Tabel 1-1
Kedudukan Sekolah Dasar 1940-1950⁴⁸

Era	Tahun Ajaran	Sekolah Dasar	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
Kolonial Belanda	1940/41	17.848	2.259.245	45.415
Pendudukan Jepang	1944/45	15.009	2.253.410	36.287
Republik Indonesia	1950/51	23.801	4.926.370	38.850

⁴⁶ Soegarda Poerbakawaja, *op.cit.*, hal. 33. Sumarsono Mestoko, *op.cit.*, hal. 90

⁴⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta:Depdikbud, 1983, hal. 50-51

⁴⁸ H.A.R. Tilaar, *op.cit.*, hal 50

Menurut Djohan Makmur terjadinya penurunan jumlah sekolah, murid, dan guru disebabkan pada awalnya Jepang memiliki beberapa kesulitan yang perlu diatasi, lebih-lebih guru.⁴⁹ Kesulitan mengenai guru karena pemerintah kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru bumiputera untuk sekolah-sekolah menengah, apalagi sekolah menengah atas. Kesulitan lainnya ialah mengenai buku-buku pelajaran. Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sementara pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Untuk itu semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dikeluarkan oleh *Bunkyo Kyoku* (Kantor Pengajaran). Bilamana buku-buku berbahasa Jepang atau terjemahannya tidak diterima, maka para guru berusaha menerjemahkan dan menyusunnya sendiri ke dalam bahasa Indonesia.⁵⁰ Di sinilah tanggung jawab yang besar dari para guru Indonesia yang menguasai bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pengantar tetapi juga sebagai bahasa ilmiah.

Untuk menutupi kekurangan guru, pemerintah pendudukan Jepang membuka jenis-jenis pendidikan guru. Pendidikan guru ini tidak bersifat dualistik⁵¹ sebagaimana terjadi

⁴⁹ Djohan Makmur, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 100

⁵⁰ Lihat Soegarda Poerbakawatja, *op.cit.*, hal. 292-294

⁵¹ Seperti kita ketahui, bahwa pada zaman kolonial Belanda terdapat dua jalur pendidikan, yaitu jalur untuk pendidikan anak-anak Belanda dan jalur untuk pendidikan anak-anak bumiputera. Bahasa pengantarnya pun berbeda, yang satu menggunakan bahasa Belanda sedangkan yang kedua menggunakan bahasa Indonesia/Melayu. Sistem pendidikan yang demikian memang disesuaikan dengan keadaan masyarakat waktu itu, yaitu masyarakat kolonial dan masyarakat bumiputera.

pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jenis pendidikan guru tersebut ada tiga jenis sekolah, yaitu :

1. Sekolah Guru (SG) 2 tahun, yang dinamakan *Sjootoo Sihan Gakko*
2. Sekolah Guru Menengah (SGM) 4 tahun, yang dinamakan *Guutoo Sihan Gakko*
3. Sekolah Guru Tinggi (SGT) 6 tahun, yang dinamakan *Kootoo Sihan Gakkoo*.⁵²

Pada sekolah guru yang lebih rendah, terdapat aturan-aturan yang menjalankan *Kentei Siken* (Ujian Pengakuan)⁵³ untuk menjadi guru Sekolah Rakyat. Syarat-syarat untuk mengikuti ujian itu antara lain penduduk di Jawa, harus sudah tamat dari sekolah menengah atau sekolah yang sepadan dengan itu, berbadan sehat dan bersemangat untuk membantu pemerintah balatentara Jepang.⁵⁴ Kepada yang lulus ujian pengakuan diberikan surat ijazah Sekolah Rakyat sesuai jenis ujian yang diikuti. Orang yang mempunyai ijazah *Kokumin Gakko Seikyooiin* (guru biasa di Sekolah Rakyat) diakui sah berpengetahuan sama dengan orang yang tamat Sekolah Guru Negeri dan boleh mengajar di Sekolah Rakyat. Adapun gajinya yang diterima oleh mereka yang lulus ujian tersebut sebesar Rp.16,- sampai Rp. 38,- rupiah sebulan.⁵⁵ Untuk gaji guru

⁵² I. Djumhur dan H. Danasuparta. *op.cit.*, hal. 197-98. Lihat juga Djohan Makmur. *op.cit.*, hal 104

⁵³ Macam-macam ujian pengakuan itu adalah ujian *Kokumin Gakko Seikyooiin* (Guru Biasa di Sekolah Rakyat), ujian *Kokumin Gakko Zyunkyooin* (Guru Pembantu di Sekolah Rakyat) dan *Syoto Kokumin Gakko Kyooiin* (Guru Sekolah Pertama). *Kan Po* No. 59 Tahoen ke III Boelan I-(2605), hal. 6

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 7-8

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 9

sekolah menengah dan sekolah tinggi, penulis tidak mendapatkan datanya.

Bagi Jepang, guru dipandang sebagai orang yang sangat dihormati. Sang guru mendapat kehormatan dengan julukan *Sensei* yang mempunyai kedudukan sosial yang sangat dihormati. Begitu pula oleh murid-muridnya di sekolah yang berbeda dengan sekarang (kurang penghargaan). Jepang mungkin sangat berterima kasih kepada guru yang telah berjuang untuk mempropagandakan misinya pada masyarakat luas, khususnya para siswa. Siswa sendiri begitu tunduk, sopan, hormat, dan segan pada guru sehingga kedudukan guru pada waktu itu lebih terpondasi secara jabatan ketimbang moral.⁵⁶

Berbeda dengan masa pendudukan Hindia Belanda dimana guru-guru membentuk satu wadah organisasi (PGHB atau PGI) sebagai wadah perjuangannya, pada zaman pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak ada wadah yang menaunginya. Organisasi guru secara khusus tidak dapat hidup seperti juga partai-partai atau organisasi massa Indonesia selain yang bukan ciptaan Jepang. Hal itu disebabkan pemerintah pendudukan Jepang telah mengeluarkan Undang-Undang yang melarang adanya pergerakan politik di Indonesia.⁵⁷ Jika ada, pergerakan itu akan ditujukan bagi usaha perang Jepang. PGI yang terbentuk pada masa pemerintah kolonial Belanda, menyatakan siap bergabung dengan organisasi bentukan

⁵⁶ Wawancara dengan Mayjen (Purn) R.H.A. Saleh, M.Hum dan Basyuni Suriamiharja tahun 2003

⁵⁷ Undang-Undang No. 3 tertanggal 20 Maret 1942 menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang melarang semua pembicaraan tentang pergerakan nasional, masa depan negara Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan sang Merah Putih. Suhartono, *op.cit.*, hal. 121

Jepang. Hal itu dapat diketahui dengan bergabungnya sejumlah 15.000 anggota PGI dalam Putera⁵⁸ .

Rupa-rupanya pihak Jepang menyadari bahwa Putera lebih banyak bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada pihaknya sendiri. Putera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan Indonesia daripada usaha perang Jepang. Karenanya Jepang menyatakan berdiri organisasi *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Jawa).⁵⁹ Jawa Hokokai itu mempunyai peraturan keanggotaan yang khusus. Menurut peraturan ini syarat untuk diterima menjadi anggota adalah minimal berusia 14 tahun, bangsa Indonesia atau Jepang, pegawai negeri, atau anggota organisasi kelompok profesi. Sebagai organisasi sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam *hokokai* sesuai dengan bidang profesinya, guru-guru pun bergabung dalam wadah *Kyoiku Hokokai* (Kebaktian Para Pendidik). Pengerahan para guru dalam *Jawa Hokokai* itu sepenuhnya diharapkan menjadi potensi sosial masyarakat dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya.

⁵⁸ Putera yang berdiri pada tanggal 1 Maret 1943 adalah organisasi rakyat Indonesia yang dipimpin Soekarno dengan tujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang telah dihancurkan oleh imperialisme Belanda. Bagi Jepang sendiri tujuan Putera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perang Asia Timur Raya. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hal 20-21. Lihat juga *Asia Raja*, 10 Maret 1943

⁵⁹ Alasan untuk membentuk badan baru itu menurut keterangan Pemerintah Jepang adalah karena semakin hebatnya perang, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap rakyat lahir dan batin. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hal. 22

Demikianlah guru-guru Indonesia sampai akhir masa pendudukan Jepang (1945) tidak membentuk organisasi sendiri, melainkan menggabungkan diri pada organisasi bentukan Jepang seperti Putera dan Jawa Hokokai yang bagi Jepang sangat berpotensi untuk pengerahan massa demi kemenangan Perang Asia Timur Raya.

C. Guru Pada Masa Awal Kemerdekaan

Menurut UUD 1945, Pasal 31 ayat 1, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti Pemerintah Republik Indonesia (RI) mempunyai tugas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam usaha menjalankan tugas tersebut, Pemerintah RI pada awal Proklamasi 17 Agustus 1945 menghadapi berbagai macam kesulitan. Kesulitan itu antara lain kekurangan gedung-gedung sekolah dan tenaga pengajar (guru). Kesulitan itu semakin besar ketika Indonesia menghadapi Perang Kemerdekaan.

Pemerintah baru efektif mengatasi kesulitan tersebut setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan. Sedikitnya ada dua usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekuarangan gedung-gedung sekolah, yaitu dengan mendirikan gedung-gedung baru dan menyewa rumah-rumah penduduk untuk dijadikan sekolah-sekolah.⁶⁰ Sementara itu sewaktu

⁶⁰ Sampai akhir tahun pelajaran 1954/1955, rakyat di seluruh Indonesia telah menyumbang 6.878 buah rumah lengkap dengan tanah dan kolamnya untuk dijadikan sekolah, I. Djumhur dan H. Danasuparta, *op. cit.*, hal. 209.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran dikeluarkan, pelaksanaan wajib belajar masih terhambat oleh jumlah sekolah dan guru yang belum memadai. Seperti yang sudah dijelaskan, pada awal proklamasi jumlah guru yang terdidik masih sangat terbatas. Sebagian guru adalah lulusan sekolah *Kweekschool* dan *Normalschool* (pada masa kolonial Belanda), *Sjooto Sihan Gakko* dan *Guutoo Sihan Gakko* (masa pendudukan Jepang). Oleh sebab itu, suatu jenis pendidikan guru mutlak diperlukan.

Untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah mendirikan lembaga pendidikan guru sementara secara masal yang disebut Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar Kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB).⁶¹ Siswa yang memasuki lembaga pendidikan ini adalah para pelajar lulusan SD dengan hasil yang baik, kesehatannya baik, dan berwatak susila serta berumur antara 15-18 tahun. Semua pelajar KPKPKB diharuskan mengikat kontrak dengan pemerintah dengan jaminan mendapatkan tunjangan yang diperoleh sebesar Rp. 85,- (delapan puluh lima rupiah) perbulan. Adanya tunjangan tersebut, bagi masyarakat di tingkat desa menjadi guru waktu itu merupakan suatu kebanggaan.⁶²

Adanya KPKPKB, kebutuhan akan tenaga guru untuk pelaksanaan wajib belajar dengan cepat dapat terpenuhi. Perkembangan berikutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, KPKPKB ditingkatkan menjadi Sekolah Guru B

⁶¹ Pemerintah mendirikan KPKPKB pada bulan September 1950 melalui Keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tertanggal 5 Juni 1950

⁶² *Suara Guru*, Oktober 1953

(SGB) 4 tahun dan kemudian menjadi Sekolah Guru A (SGA) 6 tahun.⁶³ Sementara itu untuk menyuplai pendidikan disekolah menengah, pemerintah membuka program Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), Kursus B I yang lamanya 3 tahun, dan Kursus B II yang lamanya 2 tahun sesudah BI untuk diarahkan menjadi guru di Sekolah Lanjutan Atas (SLA).

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1954 sesuai dengan saran Mr. Mohammad Yamin, didirikanlah perguruan tinggi yang bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) untuk mendidik guru sekolah menengah. PTPG ini berdiri di empat empat, yaitu Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondodano. Pada tahun 1961 berdasarkan kesepakatan antara Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dan Departemen Perguruan Tinggi. Dalam kesepakatan itu, PTPG dimasukan ke dalam universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ditujukan untuk mendidik calon sekolah lanjutan (baik lanjutan pertama maupun lanjutan atas). Berdirinya FKIP itu, maka program-program PGSLP, Kursus B I dan B II diintegrasikan dalam program FKIP.⁶⁴

⁶³ Pendidikan SGB dimaksudkan untuk mendidik guru SR. Murid yang diterima adalah lulusan SR yang lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. SGA sendiri menerima muridnya dari lulusan sekolah lanjutan pertama. Sehubungan dengan kebutuhan guru SR yang mendesak, dibukalah sekolah guru yang dalam waktu singkat dapat menghasilkan guru. Untuk itu didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR yang disebut Sekolah Guru C (SGC). Namun keberadaan SGC dirasakan kurang bermanfaat sehingga SGC ditutup dan sebagian dijadikan SGB. Penutupan SGC itupun atas saran dari PGRI dengan pertimbangan bahwa pendidikan guru dua tahun kurang memenuhi syarat untuk mengajar dan kurang dewasa untuk menjadi seorang guru. *Suara Guru*, Oktober 1953

⁶⁴ Mengenai perkembangan pendidikan guru ini, lihat H.A.R. Tilaar, *op. cit.*, hal. 79-87, Wardiman Djojonegoro, *op.cit.*, hal. 105-107

FKIP sebagai lembaga pendidik calon guru dipandang tidak memenuhi harapan pihak Departemen PD dan K sehingga Prof. Dr. Prijono (Menteri PD dan K) mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) di bawah Departemen PD dan K sebagai alternatif pengganti FKIP yang berada di bawah Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Akibat didirikannya IPG tersebut, timbul dualisme penyelenggara lembaga pendidikan untuk guru sekolah menengah, yaitu Departemen PD dan K dan PTIP. Keadaan tersebut menimbulkan keresahan pada sivitas akademik FKIP seluruh Indonesia yang klimaksnya terjadi Konferensi Badan Koordinasi Senat Mahasiswa FKIP seluruh Indonesia pada tahun 1960 untuk menuntut kepada Presiden Soekarno membubarkan IPG. Akhirnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 1963 pada tanggal 3 Januari 1963 FKIP dan IPG dileburkan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) di bawah Departemen PTIP yang setara dengan universitas dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan guru untuk sekolah menengah.

Setelah mengetahui jenjang pendidikan guru mulai dari SGA, SGB, SPG, SGO, SGA, PGSLP, PGSD, PTPG, FKIP, dan IKIP, bagaimanakah tingkat kehidupan para guru Indonesia?

Bila dibandingkan dengan keadaan guru pada sekitar tahun 1950-an, peranan guru di zaman sekarang sudah amat berbeda. Kalau dulu guru dianggap sebagai orang yang banyak tahu dan untuk itu masyarakat datang kepada guru. Namun perkembangan selanjutnya, guru tidak lagi duduk di

“singgasana” yang terhormat dan menikmati status kultural guru yang memang tinggi saat itu. Kebetulan pula di masa lalu (1950-1960-an) jumlah guru masih sangat langka dan umumnya berasal dari keluarga status sosial-ekonomi yang relatif baik.

Meskipun di tahun 1950-an jabatan guru masih terpendang, ternyata generasi muda (murid-murid sekolah) terlihat kurang berminat dengan pekerjaan guru. Faktor penyebabnya, pekerjaan guru tidak menjamin hidup lebih baik.

Ditinjau dari status ekonomi, masyarakat memandang guru termasuk kelompok berpenghasilan rendah (*Low income earners*). Pandangan ini dapat dipahami karena memang demikianlah adanya. Misalnya, gaji guru SD lulusan Program D II yang baru diangkat tidak lebih baik dari upah minimum regional (UMR) pekerja pabrik yang hanya berpendidikan SD, SMP, atau SMA. Karena kondisi itu, dalam persepsi masyarakat, sebagian besar guru berada pada lapisan berpenghasilan rendah dan hanya sebagian kecil berada pada lapisan menengah-bawah (*Lower-middle income earners*).

Didasari kepedulian untuk mengangkat citra dan martabat guru di Indonesia, diciptakanlah *Hymne Guru* pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Dr. Daoed Joesoef (1978-1982). Penciptaan hymne itu dimaksudkan untuk menghormati dan mengangkat citra dan martabat guru. Memang dalam hymne itu guru diangkat, dipuji, dikagumi, diagungkan, dan dijuluki sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Perhatikan isi dari Hymne Guru berikut ini.

Hymne Guru

*Terpujilah wahai Engkau ibu Bapak Guru
Namamu akan selalu hidup, dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
S'bagai prasasti trima kasihku 'ntuk pengabdianmu*

*Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapak Guru
Namamu akan sellau hidup, dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
S'bagai prasasti trima kasihku 'ntuk pengabdianmu*

*Engkau bagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa*

Sejalan dengan kesadaran dan kepedulian para guru, sebagian masyarakat dan pejabat pemerintah mulai peduli terhadap perbaikan nasib guru serta upaya mengangkat citra guru dan martabatnya dirasakan semakin kuat. Kesadaran itu tumbuh setelah melihat kenyataan bahwa imbalan yang diterima oleh para guru belum layak bila dibandingkan dengan beban tugas yang dipikulnya. Untuk itu perlu adanya standar kehidupan yang sepantasnya diperoleh sesuai dengan predikatnya sebagai pendidik bangsa.

Adanya kepedulian itu pula, orang mulai melihat kembali lirik Hymne Guru. Tampaknya dalam lirik itu tidak ditemukan kata, kalimat, atau makna baik yang secara eksplisit maupun implisit yang mengarahkan pada nasib dan kesejahteraan guru. Dalam lirik itu hanya ada penghargaan moral yang berupa pengakuan atas jasa-jasanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sehingga peningkatan kesejahteraan guru seolah tidak diperlukan.

Apakah sebabnya tema kesejahteraan guru— dalam artian luas meliputi gaji, tunjangan, dan rasa aman dalam menjalankan tugas— perlu dikedepankan? Jawabannya, karena berbagai studi yang dilakukan, tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi kinerja guru dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁶⁵ Bagi guru yang penting adalah kesejahteraan mereka meningkat sehingga status profesi mereka pun akan ikut terangkat dan kebanggaan terhadap profesinya akan meningkat. Pernyataan itu— meskipun tidak seluruhnya benar— baik-buruknya tingkat kesejahteraan merupakan ukuran penting martabat suatu profesi.⁶⁶ Apalagi sebagian guru tergolong berpendidikan baik dan terlatih sehingga perlu digaji dengan baik pula. Tetapi kenyataannya, profesi guru kurang mendapatkan imbalan yang layak.

Berkenaan dengan kesejahteraan materil, khususnya yang bersumber dari gaji dan tunjangan lainnya, diakui bahwa apa yang diperoleh guru masih minim. Kenaikan gaji selama ini cenderung baru upaya mengimbangi laju inflasi. Akibatnya, secara riil, daya beli guru tidak banyak meningkat.

⁶⁵ Dari beberapa studi internasional mengenai mutu pendidikan di berbagai negara, dilaporkan bahwa beberapa negara di Asia, Amerika, Australia, dan Eropa telah memberikan perhatian khusus pada gaji dan peningkatan kesejahteraan guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di negaranya. Lihat, Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999, hal. 7-8

⁶⁶ Pakar pendidikan Ki Supriyako (Guru Besar Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/UST) mengatakan bahwa apabila ingin meningkatkan profesionalisme guru, tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kesejahteraannya. *Pikiran Rakyat*, 10 Maret 2003